

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TALANG MUANDAU
TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Camat

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

**SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TALANG MUANDAU
TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$ Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Camat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.	Predikat di dapat dari Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA SASARAN PENDUKUNG DARI SASARAN STRATEGIS PERTAMA YAKNI MENINGKATNYA KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai Standar Operasional Prosedur	Nilai ini diperoleh dari Hitungan Komposit. Data yang dipersiapkan jumlah SOP yang tersedia untuk pelayanan publik, Persentase kesesuaian Persyaratan SOP dengan rumus Jumlah persyaratan sesuai SOP setiap pelayanan publik yang dilakukan dibagi dengan jumlah persyaratan SOP x 100%.	$\frac{\text{Jumlah Persentase Keterpenuhan Persyaratan setiap layanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik Keseluruhan}} \times 100$	Eselon IV
2.	Meningkatnya Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas	Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti sebatas wewenang bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan. Gangguan Kamtibmas dimaksud antara lain Penyakit Masyarakat (Balapan Liar, Pemakaian Knalpot Brong, Minuman Keras Jenis Tuak, Pergaulan Bebas Remaja) dan Penertiban Pedagang Kaki Lima	$\frac{\text{Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtibmas selama satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
3.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan	Persentase Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana yang menjadi objek penilaian merupakan sarpras yang berada di pelayanan publik (Paten).	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarpras di pelayanan publik (Paten)}} \times 100$	Eselon III.b
4.	Meningkatnya Desa yang Berkinerja Baik	Persentase Desa Mandiri	Nilai diperoleh dari IDM (Indeks Desa Membangun) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni 1.Desasangat Tertinggal, 2.Desasangat Tertinggal, 3.Desasangat Berkembang, 4.Desasangat Maju dan 5.Desasangat Mandiri.	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Eselon IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA SASARAN PENDUKUNG DARI SASARAN STRATEGIS KEDUA YAKNI MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH					
No		Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
2.	Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
3.	Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris


CAMAT TALANG MUANDAU
RISKY ARRIANDY, S.STP.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19910409 201206 1 001